

## Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan di Nagari Salimpek Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

*The Technical Guidance on Financial Management Oversight in Nagari Salimpek, Solok Regency, West Sumatra Province*

Vita Fitria Sari <sup>1</sup>

Halkadri Fitra <sup>2\*</sup>

Nurzi Sebrina <sup>1</sup>

Salma Taqwa <sup>2</sup>

Charoline Cheisviyanny <sup>1</sup>

Herlina Helmy <sup>1</sup>

Efrizal Syofyan <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padang State University, Padang, West Sumatra, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Accounting, Vocational School, Padang State University, Padang, West Sumatra, Indonesia

email: [halkadri.fitra@gmail.com](mailto:halkadri.fitra@gmail.com)

### Kata Kunci

Keuangan  
Pengawasan  
Salimpek

### Keywords:

Financial  
Oversight  
Salimpek

**Received:** August 2025

**Accepted:** September 2025

**Published:** November 2025

### Abstrak

Bimbingan Teknis (Bimtek) pengawasan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Nagari Salimpek, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur nagari dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan perangkat nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), serta perwakilan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek pengawasan, pelaporan, dan pengendalian penggunaan dana nagari. Pelaksanaan Bimtek menggunakan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta simulasi penyusunan dokumen pengawasan berbasis aplikasi digital. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur pengelolaan keuangan nagari sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta peraturan yang berlaku di Kabupaten Solok dan prinsip akuntabilitas publik. Peserta juga mampu mengidentifikasi potensi risiko penyalahgunaan dana dan menyusun strategi pencegahan serta mekanisme pengawasan yang efektif. Berdasarkan evaluasi pasca-kegiatan, tingkat ketercapaian pengetahuan mencapai 87, keterampilan 85, dan kesadaran untuk berkomitmen sebesar 95%. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh pembinaan berkelanjutan bagi nagari-nagari lain di Kabupaten Solok dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang profesional dan berintegritas.

### Abstract

*The Technical Guidance (Bimtek) on Financial Management Oversight, held in Nagari Salimpek, Solok Regency, West Sumatra Province, aimed to strengthen the capacity of nagari officials in establishing transparent, accountable, and legally compliant financial governance. The activity involved the Nagari apparatus, the Nagari Consultative Body (BPN), and community representatives, with a focus on enhancing knowledge and skills in monitoring, reporting, and controlling the use of Nagari funds. The implementation of Bimtek employed methods such as material delivery, interactive discussions, case studies, and simulations to prepare oversight documents using digital applications. The results indicated an improvement in participants' understanding of village financial management procedures in accordance with Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 20 of 2018, as well as the applicable regulations in Solok Regency and the principles of public accountability. Participants were also able to identify potential risks of fund misuse and develop preventive strategies and effective monitoring mechanisms. Based on the post-activity evaluation, the achievement rates were 87% for knowledge, 85% for skills, and 95% for commitment awareness. This program is expected to serve as a model for continuous capacity-building in other nagaris in Solok Regency, enabling them to achieve professional and integrity-based village financial governance.*



© 2025 Vita Fitria Sari, Halkadri Fitra, Nurzi Sebrina, Salma Taqwa, Charoline Cheisviyanny, Herlina Helmy, Efrizal Syofyan. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i11.10598>

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pada level pemerintahan desa atau nagari memegang peran krusial dalam menunjang keberhasilan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Di Provinsi Sumatera Barat, nagari sebagai entitas masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengelola kepentingan warganya, termasuk dalam hal keuangan, dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (BPK RI, 2021). Prinsip tersebut meliputi penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta efisiensi pada setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan (Alfiani *et al.*, 2021; Fitra *et al.*, 2024; Rahmayanti Yusuf *et al.*, 2022; Tarima *et al.*, 2022). Dengan meningkatnya jumlah dana yang diterima nagari, seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin penting. Pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan berbagai regulasi sebagai pedoman, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta sejumlah aturan teknis lainnya. Namun, kenyataannya di lapangan masih ditemukan banyak aparatur nagari yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. (BPKP, 2015). Pengelolaan keuangan desa atau nagari mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tujuan pengelolaan keuangan desa adalah menjamin penggunaan dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat (BPK RI, 2024). Prinsip utama pengelolaan keuangan desa/nagari adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2009). Dalam implementasinya, proses ini dilakukan secara partisipatif melalui penyusunan APB Nagari, pelaksanaan program, pencatatan transaksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang (Ali *et al.*, 2023; Dewi *et al.*, 2022; Intan Arianto *et al.*, 2024). Salah satu aspek yang kerap menjadi tantangan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan berperan sebagai instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai rencana, mengurangi risiko penyalahgunaan, serta mendeteksi dan menangani potensi penyimpangan sedini mungkin. (Kurniawan *et al.*, 2020; Paun *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, inspektorat daerah memegang peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk di tingkat nagari. Meski demikian, efektivitas pengawasan tidak semata-mata bergantung pada inspektorat, tetapi juga pada kapasitas aparatur nagari dalam memahami dan melaksanakan fungsi pengawasan internal secara berkesinambungan. Pengawasan yang optimal mampu mencegah penyalahgunaan dana, mengurangi risiko pelanggaran prosedur, serta memperkuat akuntabilitas publik (Mahmudi, 2019). Nagari Salimpek di Kabupaten Solok merupakan salah satu nagari yang tengah berupaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan. Nagari ini memiliki potensi ekonomi dan sosial yang signifikan untuk dikembangkan, namun keberhasilan pemanfaatan potensi tersebut sangat ditentukan oleh mutu pengelolaan serta efektivitas pengawasan keuangannya (BPS Kabupaten Solok, 2024). Berdasarkan temuan awal, aparatur nagari menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain minimnya pemahaman terhadap regulasi terbaru, terbatasnya keterampilan teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi, serta belum maksimalnya penerapan sistem pengendalian internal. (Fitra *et al.*, 2018; Indra Arza *et al.*, 2022; Masdupi *et al.*, 2021). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) menjadi salah satu strategi yang tepat. Bimtek pengawasan pengelolaan keuangan berperan sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur nagari, khususnya mengenai prosedur, metode, dan teknik pengawasan yang efektif. Melalui kegiatan ini, aparatur nagari diharapkan memahami prinsip-prinsip pengawasan yang baik, mampu mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menyusun laporan hasil pengawasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Bimtek ini juga menjadi forum komunikasi dan diskusi antara aparatur nagari dengan pihak inspektorat maupun narasumber yang kompeten. Interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus

menjadi ajang berbagi pengalaman dan solusi atas berbagai kendala di lapangan. Dengan demikian, Bimtek tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan internal nagari secara kelembagaan. Urgensi penyelenggaraan Bimtek pengawasan pengelolaan keuangan di Nagari Salimpek semakin terasa seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Saat ini, masyarakat lebih kritis dalam menilai kinerja pemerintahan nagari, terutama terkait pengelolaan dana yang berasal dari APBN dan APBD. Ketidakmampuan mengelola serta mengawasi keuangan secara tepat dapat memicu persoalan hukum, menurunkan tingkat kepercayaan publik, dan menghambat kemajuan pembangunan nagari. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimtek menjadi langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus memastikan dana nagari digunakan secara tepat sasaran. Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan di Nagari Salimpek bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga merupakan implementasi dari teori tata kelola keuangan publik. Konsep-konsep yang menjadi fondasi teoretis antara lain dari merujuk pada konsep capacity building (Grindle, 1997), yang menyatakan bahwa bimtek merupakan instrumen untuk meningkatkan kapasitas individu dan institusi agar mampu mengelola keuangan secara lebih efektif (Grindle, 1997). Selanjutnya kegiatan bimtek yang dilaksanakan merupakan usaha menciptakan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik berdasarkan pada prinsip partisipasi (*Participation*), supremasi hukum (*Rule of Law*), transparansi (*Transparency*), responsivitas (*Responsiveness*), konsensus (*Consensus Oriented*), kesetaraan dan inklusivitas (*Equity and Inclusiveness*), efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) dan akuntabilitas (*Accountability*) (Pemerintah RI, 2014; UNDP, 1997).

## METODE

### *Alat dan Bahan*

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pengelolaan Keuangan di Nagari Salimpek memerlukan dukungan berbagai alat dan bahan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, efektif, dan sesuai tujuan. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

**Tabel I.** Alat dan Bahan Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan di Nagari Salimpek.

No	Kategori	Alat/Bahan	Kegunaan
1	Alat	Laptop/Komputer	Menampilkan materi, simulasi pencatatan, dan pengolahan data keuangan.
2		Proyektor dan Layar	Menayangkan materi presentasi kepada peserta.
3		Sound System dan Mikrofon	Memastikan penyampaian materi terdengar jelas oleh seluruh peserta.
4		Pointer/Remote Presentasi	Memudahkan narasumber mengoperasikan slide dari jarak jauh.
5		Papan Whiteboard/Flipchart dan Spidol	Menjelaskan konsep tambahan dan menulis hasil diskusi.
6		Kamera/Perangkat Dokumentasi	Mengabadikan kegiatan untuk laporan dan arsip.
7	Bahan	Materi Bimtek (softcopy & hardcopy)	Panduan pelatihan dan referensi regulasi terkait pengelolaan keuangan.
8		Modul dan Handout Pelatihan	Ringkasan materi dan latihan studi kasus.
9		Formulir Pendaftaran & Daftar Hadir	Pendaftaran peserta dan administrasi kegiatan.
10		Kertas Kerja/Worksheet	Latihan pengisian format pelaporan dan simulasi pengawasan.
11		Alat Tulis Peserta (buku, bolpoin, spidol)	Mencatat materi dan hasil diskusi.
12		Bahan Konsumsi dan Air Minum	Menjaga kenyamanan dan konsentrasi peserta.
13		Spanduk/Banner Kegiatan	Identitas kegiatan dan dokumentasi visual.
14		Microsoft PowerPoint	Menyusun dan menampilkan presentasi materi.
15		Microsoft Excel / Aplikasi Siskeudes	Simulasi pencatatan dan pelaporan keuangan nagari.
16		PDF Reader	Membuka dokumen regulasi dan panduan.

Berdasarkan Tabel 1, peralatan yang digunakan mencakup perangkat utama seperti *laptop* atau komputer, proyektor dan layar, serta sound system dan mikrofon yang berfungsi memudahkan penyampaian materi dan interaksi antara narasumber dengan peserta. Peralatan pendukung seperti *pointer/remote* presentasi, papan *whiteboard* atau *flipchart*, dan kamera dokumentasi digunakan untuk memperjelas materi, mencatat hasil diskusi, serta merekam jalannya kegiatan sebagai bahan laporan. Bahan yang digunakan mencakup materi Bimtek dalam bentuk cetak maupun digital, modul dan

handout, formulir administrasi, serta lembar kerja untuk latihan dan simulasi. Perlengkapan pendukung seperti alat tulis peserta, konsumsi, dan spanduk kegiatan juga disiapkan guna menunjang kenyamanan dan memperkuat identitas acara. Selain sarana fisik, kegiatan ini memanfaatkan perangkat lunak seperti *Microsoft PowerPoint* untuk presentasi, *Microsoft Excel* atau aplikasi Siskeudes untuk simulasi pengelolaan keuangan, serta *PDF Reader* untuk mengakses dokumen regulasi. Perpaduan lengkap antara sarana, bahan, dan perangkat lunak tersebut membuat kegiatan Bimtek dapat berlangsung secara interaktif, informatif, dan memenuhi standar pelatihan pengelolaan keuangan nagari.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengawasan pengelolaan keuangan di Nagari Salimpek, Kabupaten Solok, dilaksanakan oleh Tim Kegiatan Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang (LPPM UNP) yang terdiri atas 5 orang dosen dan dibantu 2 mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan merupakan kombinasi metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi praktik. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menguasai keterampilan praktis dalam mengawasi pengelolaan keuangan nagari. Pelaksanaan kegiatan ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup.



**Gambar 1.** Peserta Kegiatan Bimtek Pengawasan Keuangan Nagari.

Pada tahap persiapan, kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Nagari Salimpek dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menentukan jadwal, lokasi, serta daftar peserta. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi Bimtek yang mencakup regulasi terkini, prosedur pengawasan, dan format pelaporan keuangan, disertai penyiapan peralatan serta bahan sesuai daftar pada Tabel 1. Tahap pelaksanaan dimulai dengan pembukaan acara, meliputi sambutan dari pihak nagari dan penyampaian tujuan kegiatan. Materi kemudian disampaikan melalui metode ceramah dengan bantuan *laptop*, LCD, dan *sound system* agar informasi tersampaikan dengan jelas. Sesi ini dilengkapi diskusi dan tanya jawab, menggunakan papan *whiteboard* atau *flipchart* untuk menuliskan poin-poin penting, menjawab pertanyaan peserta, serta merangkum ide yang muncul. Setelah itu, peserta mengikuti simulasi dan latihan, yaitu pengisian format pelaporan keuangan dan simulasi pengawasan menggunakan *Microsoft Excel* atau aplikasi Siskeudes yang tersedia di *laptop*. Narasumber memberikan pendampingan langsung bagi peserta yang mengalami kendala teknis atau kesulitan memahami materi. Tahap penutup mencakup penyampaian rangkuman materi dan pesan akhir, dilarutkan dengan pengisian formulir evaluasi oleh peserta. Kegiatan diakhiri dengan dokumentasi akhir berupa foto dan video sebagai bahan laporan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Kegiatan**

Bimbingan teknis (bimtek) ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 dimulai sejak jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB sebagai bentuk pendampingan kepada aparatur nagari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan

masyarakat dalam pengawasan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peserta Bimtek meliputi perangkat nagari yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, anggota BPD yang menjalankan fungsi pengawasan, serta perwakilan masyarakat yang berperan dalam pemantauan dan mendukung keterbukaan informasi.



Gambar 2. Suasana Kegiatan Bimtek Pengawasan Keuangan Nagari.

Bimtek yang dilaksanakan selama satu hari dengan menggunakan format pelatihan di kelas (*classroom training*) yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok dan simulasi teknis. Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan 2 narasumber utama yaitu Bapak Hafizol Gafur, SE, CRMO dari Kantor Inspektorat Kabupaten Solok dan Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA dari akademisi Universitas Negeri Padang. Peserta berjumlah sebanyak 25 orang terdiri atas Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, Ketua dan anggota BPD, serta tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pengawasan keuangan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan, dan perubahan sikap (*awareness*) terhadap pentingnya pengawasan keuangan nagari.

### **Peningkatan Pengetahuan**

Materi yang disajikan mencakup kerangka regulasi, meliputi penjelasan mendalam mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Solok terkait keuangan nagari, serta prinsip-prinsip pengawasan internal. Selain itu, dibahas tahapan pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta mekanisme pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui jalur formal maupun informal. Materi juga memuat pembahasan mengenai indikator keberhasilan pengawasan dan teknik penyusunan laporan temuan. Hasil pre-test dan post-test memperlihatkan adanya peningkatan rata-rata skor pengetahuan peserta dari 68,5 menjadi 87, yang menunjukkan bahwa penyampaian materi berjalan efektif dan topik yang diberikan relevan dengan kebutuhan peserta.

### **Penguatan Keterampilan**

Simulasi penyusunan dokumen anggaran, pembukuan sederhana, dan pencatatan transaksi keuangan menggunakan format standar memberikan peningkatan pemahaman praktis bagi peserta. Mereka dilatih untuk mengidentifikasi potensi risiko penyalahgunaan dana serta memverifikasi dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, peserta mengikuti latihan studi kasus terkait temuan audit fiktif guna mengasah kemampuan analisis dan respon cepat terhadap indikasi penyimpangan. Banyak peserta menyatakan bahwa simulasi ini membuka wawasan mereka mengenai potensi kelemahan pengawasan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Hasil evaluasi menunjukkan skor 85 pada aspek penguatan keterampilan, menandakan bahwa peserta telah mampu dan terampil dalam praktik pengawasan keuangan nagari.

### Perubahan Sikap (Awareness)

Peserta memperlihatkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Melalui diskusi kelompok yang membahas dilema etika dalam pengelolaan dana desa, peserta terdorong untuk memandang pengawasan bukan sekadar beban administrasi, tetapi sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial. Kegiatan Bimtek ini berhasil menumbuhkan komitmen penuh, dibuktikan dengan 100% pernyataan tertulis dari peserta untuk menerapkan pengawasan yang transparan. Berdasarkan tujuan awal kegiatan, ketercapaian dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel II.** Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan Bimtek.

Tujuan Bimtek	Indikator Ketercapaian	Hasil Pre Test	Hasil Post Test	Tingkat Capaian
Meningkatkan pengetahuan pengelolaan dan pengawasan keuangan	Skor post-test $\geq 80$	Rata-rata 70	Rata-rata 87	100% tercapai
Menguatkan keterampilan teknis pengawasan	Kemampuan peserta dalam simulasi mencapai nilai minimal 75	Rata-rata 72	Rata-rata 85	100% tercapai
Meningkatkan kesadaran transparansi	Komitmen tertulis peserta untuk menerapkan pengawasan yang transparan	60% peserta belum menandatangani komitmen	100% peserta sudah menandatangani komitmen	100% tercapai

Data ini menunjukkan bahwa tujuan Bimtek secara umum telah tercapai dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam mengatasi resistensi perubahan dan keterbatasan literasi digital.

### Pembahasan

Secara keseluruhan, bimtek ini berhasil mencapai target yang telah direncanakan. Pencapaian yang mencakup tiga aspek utama peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan, dan perubahan sikap (*awareness*) terhadap pentingnya pengawasan keuangan nagari menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi Nagari Salimpek. Hasil evaluasi pasca-Bimtek mengungkapkan sejumlah perubahan positif, antara lain :

1. Penerapan mekanisme pengawasan berlapis, di mana setelah pelatihan pemerintah nagari dan BPD sepakat menyusun jadwal pemeriksaan dokumen secara rutin setiap triwulan.
2. Transparansi anggaran, dengan mulai diumumkannya informasi penggunaan dana nagari secara terbuka melalui papan informasi dan media sosial nagari.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, ditandai dengan inisiatif tokoh masyarakat peserta Bimtek untuk membentuk forum komunikasi warga sebagai wadah penyampaian aspirasi dan masukan terkait pengelolaan keuangan nagari.

Dilihat dari sudut pandang teori akuntabilitas publik yang dikemukakan (Romzek *et al.*, 1987), kegiatan ini berhasil memperkuat dimensi akuntabilitas pada aspek administratif dan profesional. Peserta tidak hanya mematuhi prosedur formal, tetapi juga mulai menanamkan nilai akuntabilitas sebagai bagian dari etos kerja. Berdasarkan teori pengawasan internal (*COSO Framework*), bimtek ini mendukung dua komponen kunci, yaitu *control activities* melalui pelaksanaan simulasi teknis, serta *information & communication* melalui pelatihan keterbukaan informasi dan publikasi anggaran (Rahmawati *et al.*, 2021; Cárcaba *et al.*, 2022)). Dari perspektif tata kelola yang baik (*good governance*), kegiatan ini mendorong penerapan tiga prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Ambodo, 2023; Islamiah *et al.*, 2020). Transparasi meliputi semua proses, kebijakan, dan informasi terkait keuangan atau kegiatan pemerintahan disampaikan secara terbuka sehingga dapat diakses oleh masyarakat (Ambodo, 2023; L. Matei *et al.*, 2015). Sedangkan untuk akuntabilitas menunjukkan bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum, aturan, dan etika. Selanjutnya untuk partisipasi memperlihatkan bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah nagari, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Agar hasil bimtek dapat berkelanjutan, direkomendasikan beberapa langkah yaitu :

1. Pelatihan lanjutan literasi digital, dimana pemerintah nagari Salimpek fokus pada penggunaan aplikasi pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi.
2. Pendampingan periodik, melalui adanya tim pendamping dari akademisi atau lembaga teknis perlu melakukan kunjungan berkala untuk memantau implementasi hasil Bimtek.

3. Integrasi dengan sistem insentif yaitu pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada nagari dengan kinerja pengawasan terbaik, dan
4. Penyusunan SOP Pengawasan, diharapkan pemerintah Nagari Salimpek memiliki dokumen standar yang memuat langkah-langkah pengawasan, format laporan, dan alur komunikasi antar pihak.

Bimtek pengawasan pengelolaan keuangan di Nagari Salimpek memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta. Dengan metode yang menggabungkan teori, simulasi, dan diskusi interaktif, peserta mampu memahami peran strategis pengawasan sebagai pilar utama pengelolaan keuangan nagari yang akuntabel.

## KESIMPULAN

Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan di Nagari Salimpek memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta. Dengan metode yang menggabungkan teori, simulasi, dan diskusi interaktif, peserta mampu memahami peran strategis pengawasan sebagai pilar utama pengelolaan keuangan nagari yang akuntabel.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang (LPPM UNP), Pimpinan Sekolah Vokasi UNP, Pemerintah Nagari Salimpek, Tim Pelaksana Kegiatan serta pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

## REFERENSI

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU/article/view/36125>
- Ali, H., & Saputra, F. (2023). Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance. 2(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2>
- Ambodo, T. (2023). Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/734>
- BPK RI. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188817/perda-prov-sumatera-barat-no-8-tahun-2021>
- BPK RI. (2024). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. [Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/139714/Permendagri-No-20-Tahun-2018](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/139714/Permendagri-No-20-Tahun-2018).
- BPKP. (2015). Persiapan implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <http://www.bpkp.go.id/Puslitbangwas/Konten/2473/14.127%20Persiapan-%20Implementasi-UU-No-6-Tahun-2014-Tentang-Desa#:%20E2%88%BC:Text%20=%20Pembangunan%20Desa%20Adalah%20Upaya%20Peningkatan.Manusiaserta%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Melalui>
- BPS Kabupaten Solok. (2024). Kecamatan Lembah Gumanti Dalam Angka (Vol. 14). BPS Kabupaten Solok.
- Cárcaba, A., Arrondo, R., & González, E. (2022). Does good local governance improve subjective well-being? *European Research on Management and Business Economics*, 28(2). <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100192>

- Dewi, N. M. A. M., Sudiana, I. W., & Putra, C. G. B. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 85–95. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2430>
- Fitra, H., Syofyan, E., Masdupi, E., Mulyani, E., Taqwa, S., & Halmawati. (2024). The Influence of competence and organizational commitment on village fund management accountability with transparency as a mediating variable. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 14(1), 95–110. <https://doi.org/10.47312/aar.v4i02.291>
- Fitra, H., Taqwa, S., Cheisviyanny, C., Tasman, A., Sebrina, N., Indra Arza, F., Ekonomi, F., & Halkadri Fitra, K. (2018). Tinjauan Studi Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (Nagari) Kamang Hilia Sejahtera Kenagarian Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Social and Economics Research*, 3(2). <http://lppm.ajs.unespadang.ac.id/index.php/UJSER>
- Grindle, M. S. (1997). Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries. Harvard Institute for International Development.
- Indra Arza, F., Elsa Betavia, A., & Fitra, H. (2022). Analysis of the Management of Village Owned Enterprises in Pasaman Regency with an Importance Performance Analysis Approach. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220702.004>
- Intan Arianto, P., Komang Sumadi, N., & Dwi Andayani, R. W. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banjar, Buleleng). *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 96–109. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2361>
- Kurniawan, R., & Rahmawati, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(3), 220–235. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.551>
- L. Matei, A. Matei, & C.G. Lazar. (2015). Public Service Performance and Good Ddministration. Socio Economic Empirical Evaluations, Procedia Econ. Finance, 39 (2016), 335–338. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30332-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30332-X)
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Ed. IV). Andi.
- Masdupi, E., Kurniawati, T., Fitra, H., & Faisal, D. (2021). Analysis of Financial Performance for Nagari Panampuan Saiyo Owned Enterprises. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210616.095>
- Paun, C. P., Tubahelan, Y. G., & ... (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Tata Kelola Keuangan Desa, di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. ... Jurnal Politik, Sosial .... <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/download/1222/1255>
- Pemerintah RI. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38582/Uu-No-6-Tahun-2014>.
- Rahmayanti Yusuf, N. A., Hidayat, R., & Djabbar, I. (2022). Kemampuan Desa Dala Mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Secara Akuntabel. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i5.455>
- Tarima, V. R., & MD, J. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Samarinda. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(3), 682–693. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119)
- UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. United Nations Development Programme. <https://digitallibrary.un.org/record/492551?v=pdf>